

Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan untuk Peningkatan Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Nurma Yunita^{a*}, Yuni Firayanti^a, Tubagus Mahardika^a

^a Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 11-08-2025

Revised : 24-08-2025

Accepted : 27-08-2025

Keywords: *Community Participation, Development Management, Infrastructure, Rural Development, Village Government*

Kata Kunci: *Infrastruktur, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Pemerintah Desa, Pengelolaan Pembangunan*

Corresponding Author:

nurmayuniita29@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Village development is a key pillar in promoting community welfare at the local level. However, the implementation of development programs often faces challenges, particularly in planning, execution, and community participation. This research was conducted in Sungai Malaya Village, Sungai Ambawang Sub-district, Kubu Raya Regency, to analyze the role of the village government in managing development. The main objective of this study is to determine the effectiveness of the village government's role in improving the quality of development, identify supporting and inhibiting factors, and assess the level of community participation in the process. The research uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Informants include the village head, village officials, community leaders, and local residents. The findings indicate that the village government plays a significant role in planning and implementing development, especially in infrastructure sectors such as roads, clean water, and health facilities. Community involvement through village meetings (*Musyawarah Desa*) is a key factor in the success of development programs. However, challenges such as limited funding and uneven development across village areas remain. This study contributes to the understanding of participatory and accountable village governance. Enhancing the capacity of village officials and increasing engagement with community groups, including youth and women, is essential for sustainable development. Future research is recommended to explore the effectiveness of village budget management using quantitative methods.

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Namun, implementasi

pembangunan sering kali menghadapi kendala, terutama pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terutama dalam sektor infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan. Namun, keterbatasan anggaran dan kurangnya pemerataan masih menjadi tantangan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dan pelibatan yang lebih luas dari kelompok masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan, untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas pengelolaan anggaran desa secara kuantitatif.

PENDAHULUAN

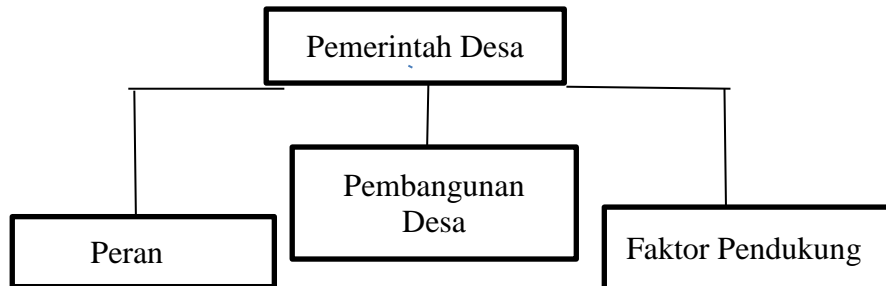
Pembangunan desa merupakan aspek fundamental dalam mencapai kemajuan nasional yang memerlukan pengembangan potensi sumber daya manusia sebagai kunci utama, dimana menurut Onis Wakerwa (2016) masyarakat pedesaan masih tertinggal dibandingkan perkotaan sehingga pemerintah desa perlu mendorong peningkatan pendidikan formal maupun informal untuk akselerasi pembangunan. Desa Sungai Malaya dengan struktur organisasi lengkap yang terdiri dari 7 orang staf desa (2019-2024) memiliki kewenangan penuh berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, menjadikan desa bukan hanya objek pembangunan tetapi juga subjek aktif yang dapat menginisiasi pembangunannya sendiri dengan dukungan kelembagaan masyarakat seperti PKK yang berperan sebagai mitra strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat melalui program posyandu, pelatihan keterampilan, dan pembinaan UMKM. Meskipun desa ini memiliki kekayaan alam berupa lahan pertanian dan perkebunan luas dengan komoditas

kelapa sawit, karet, nanas, serta telah mengembangkan UMKM pengolahan nanas, namun menurut Franhed Fredi Ranto (2022) dan Nanik Mandasari (2021) masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia profesional, kurangnya kemampuan teknis, terbatasnya anggaran, minimnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga yang termanifestasi dalam pembangunan infrastruktur jalan desa, saluran air bersih, dan fasilitas kesehatan yang belum merata. Oleh karena itu, menurut Ulber Silalahi (2022) dan Marlita & Widodo (2020), pembangunan desa yang efektif membutuhkan sinergi antara kemampuan aparatur desa, dukungan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel agar dapat menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, dan partisipatif sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal masyarakat.

Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian untuk mewujudkan organisasi yang dibutuhkan masyarakat melalui pelayanan umum dan pembangunan kesejahteraan (Fatiah Kusmandi, 2022), dengan tujuan utama memastikan organisasi mencapai keberhasilan melalui manusia dengan cara mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, mengembangkan sistem kerja berkinerja tinggi, mengelola keberagaman tenaga kerja, meningkatkan kapasitas manusia, dan mengembangkan lingkungan kerja sama tim yang fleksibel (Raymond, 2023). Kepala desa sebagai penguasa tunggal dalam pemerintahan desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat dengan masa jabatan 8 tahun berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024, dimana dalam menjalankan tugasnya harus meminta pendapat masyarakat melalui rapat desa dan bertanggung jawab atas kelancaran rumah tangga desa (Tabrani Ryusan, 2022). Pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis, dan perangkat desa lainnya memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta penjagaan kearifan lokal dan budaya desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam semangat gotong royong (Ulber Silalahi, 2022), mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kebersamaan untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 78 (Budi Sunaro, 2019). Pengelolaan pembangunan yang efektif memerlukan prinsip transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya, sementara peningkatan desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup melalui intervensi pembangunan di berbagai

sektor yang didukung oleh teori-teori seperti pembangunan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat sebagai agen perubahan, teori pemberdayaan masyarakat yang fokus pada peningkatan kapasitas untuk mengendalikan kehidupan, teori pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan ekonomi-sosial-lingkungan, teori otonomi desa yang memberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola pembangunan, dan teori kapabilitas yang mengutamakan peningkatan kemampuan individu dan kelompok untuk melakukan pilihan yang berarti dalam kehidupan mereka.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE

Bentuk Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome. (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama: observasi langsung untuk mengamati kondisi lapangan, wawancara mendalam dengan para informan kunci, dan dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti peraturan dan keputusan desa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui empat tahap, yaitu pengumpulan, penyaringan data penting (reduksi), penyajian dalam bentuk tabel atau grafik, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keakuratan hasil penelitian, dilakukan pengecekan silang data dari berbagai sumber yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula, sehingga informasi yang didapat benar-benar dapat dipercaya dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Sungai Malaya adalah hasil pemekaran dari Desa Mega Timur yang diresmikan pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Bupati Kubu Raya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012, dengan latar belakang wilayah yang luas,

jumlah penduduk banyak, dan pembangunan yang tidak merata. Nama "Sungai Malaya" diambil dari sungai yang mengelilingi wilayah desa, yaitu Sungai Malaya cabang kanan sepanjang 12 km di sebelah selatan dan cabang kiri sepanjang 22 km di bagian barat hingga utara desa. Logo desa menggunakan berbagai warna yang melambangkan potensi daerah seperti biru laut untuk potensi perairan, hijau untuk kesuburan pertanian, dan elemen-elemen seperti padi kapas, keris, serta gelombang air yang mencerminkan kekayaan alam dan semangat juang masyarakat. Desa ini memiliki visi untuk menjadi "Desa Mandiri, Maju, Produktif dan Agamis" dengan misi utama memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, membangun desa secara terarah dan berkelanjutan, meningkatkan transparansi pembangunan melalui portal berita desa, serta membangun kemitraan antara pemerintah dan swasta.

Hasil Penelitian

Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Desa Sungai Malaya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui program pembangunan infrastruktur jalan. Kepala desa dan sekretaris desa menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menyelesaikan pembangunan infrastruktur agar akses jalan yang dilalui masyarakat menjadi lebih nyaman, terutama untuk memudahkan petani mengangkut hasil perkebunan mereka ke pasar. Respons masyarakat terhadap pembangunan ini cukup positif, dengan berbagai kalangan mulai dari ketua RT, petani, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim, hingga pemuda mengakui bahwa kondisi jalan sudah mulai membaik dan memudahkan aktivitas sehari-hari mereka, meskipun pembangunan masih berlangsung secara bertahap dan belum merata di seluruh wilayah.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Dusun (MUSDUS) yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (MUSDES), menghadirkan seluruh RT, RW, tokoh masyarakat, dan staff desa untuk meminta pendapat tentang perencanaan desa ke depan. Komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dinilai cukup baik oleh sebagian besar warga, dengan adanya keterlibatan berbagai elemen masyarakat termasuk ibu-ibu majelis taklim dalam perencanaan kegiatan desa. Namun, masih terdapat kendala dalam penyebaran informasi karena tidak semua masyarakat bisa menghadiri musyawarah atau mendapatkan informasi tentang adanya pertemuan tersebut, sehingga partisipasi masyarakat belum merata di seluruh lapisan.

Faktor Pendukung, Penghambat, dan Kepuasan Masyarakat

Faktor pendukung utama dalam pembangunan desa adalah dukungan penuh dari masyarakat terhadap program-program yang dijalankan pemerintah desa. Sementara itu,

faktor penghambat yang dihadapi meliputi keterlambatan dalam mendapatkan alat berat dari kecamatan, keterbatasan dana desa, dan harga bahan bangunan yang cukup tinggi. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan desa secara umum cukup baik, dengan sebagian besar responden mengapresiasi kemajuan infrastruktur jalan yang memudahkan aktivitas mereka. Namun, beberapa warga masih merasa kurang puas karena pembangunan belum menyentuh sektor pertanian dan belum merata ke seluruh wilayah desa, meskipun mereka mengakui bahwa kemajuan pembangunan fisik sudah mencapai sekitar 70%.

Upaya dan Kemampuan Pemerintah Desa

Pemerintah desa telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola pembangunan dengan memprioritaskan pembangunan sarana air bersih dan fasilitas kesehatan menggunakan dana desa. Air bersih telah disediakan di setiap masjid dan sekolah menggunakan sistem drum penguin, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui MUSDUS untuk menampung aspirasi warga. Masyarakat menilai bahwa pemerintah desa cukup terbuka dan tidak mengelola pembangunan sendirian, melainkan melibatkan tim yang terdiri dari dusun dan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam hal anggaran, pemerataan pembangunan antar dusun, dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan beberapa program, sehingga masyarakat berharap adanya peningkatan koordinasi dan keterlibatan warga yang lebih aktif.

Rekomendasi untuk Pembangunan Desa

Prioritas utama yang perlu diperbaiki dalam pembangunan desa tetap fokus pada infrastruktur, air bersih, dan layanan kesehatan sesuai kebutuhan warga. Berbagai masukan dari masyarakat menunjukkan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti pengawasan yang lebih kuat terhadap penggunaan dana desa, penguatan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat melalui pelatihan perencanaan dan manajemen, serta perbaikan jalan yang sudah rusak dengan melakukan penambalan ulang. Selain itu, diperlukan peningkatan program yang menyentuh perempuan seperti pelatihan keterampilan rumah tangga dan dukungan untuk pengembangan usaha kecil, pemerataan pembangunan antar dusun, serta peningkatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Temuan utama menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pembangunan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Peran tersebut

dijalankan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa serta musyawarah dusun. Temuan ini sangat relevan jika dikaitkan dengan teori Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang dikemukakan oleh Fatiah Kusmandi (2022), di mana unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi landasan dalam pengelolaan organisasi yang efektif, termasuk dalam konteks pemerintahan desa.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyatakan bahwa keterlibatan warga adalah faktor penting untuk menjamin keberhasilan pembangunan. Seperti yang diungkapkan oleh Ulber Silalahi (2022), pembangunan desa akan berhasil apabila masyarakat turut serta dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini tercermin dalam praktik di Desa Sungai Malaya, di mana masyarakat diajak untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka melalui forum musyawarah desa. Hasil penelitian juga menemukan adanya peran penting organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di Desa Sungai Malaya. PKK tidak hanya menjadi wadah pemberdayaan perempuan, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak pembangunan berbasis keluarga. Peran PKK dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut: 1. Peningkatan kesehatan keluarga. 2. Pemberdayaan UMKM. 3. Pendidikan dan literasi keluarga. 4. Penguatan sosial dan budaya. 5. Mitigasi sosial dan lingkungan.

Dengan berbagai peran tersebut, PKK dapat dikatakan sebagai mitra strategis pemerintah desa. Keberadaan PKK tidak hanya melengkapi peran formal aparat desa, tetapi juga memperluas basis partisipasi masyarakat sehingga pembangunan menjadi lebih inklusif. Sinergi antara pemerintah desa dan PKK menjadikan pembangunan lebih menyentuh aspek mendasar dalam kehidupan masyarakat, yakni keluarga sebagai unit terkecil namun paling penting. Penelitian ini juga mendukung sejumlah studi sebelumnya. Penelitian oleh Mandasari (2021) menyebutkan bahwa faktor sumber daya manusia dan alam menjadi penentu dalam keberhasilan pembangunan desa menuju kemandirian. Di Desa Sungai Malaya, peran pemerintah desa dalam memanfaatkan potensi lokal seperti komoditas nanas dan kelapa sawit menunjukkan adanya upaya konkrit dalam menggerakkan ekonomi lokal. Begitu pula dengan temuan dari Dewi Sarah Simbolon dan Julita Sari (2021) yang menyebutkan bahwa pemerintah desa memiliki peran krusial dalam mendorong swadaya masyarakat, sangat sesuai dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan keterlibatan masyarakat, termasuk pemuda, ibu-ibu majelis taklim, dan kelompok PKK, dalam berbagai program pembangunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan seperti PKK, memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Semakin besar partisipasi masyarakat dan organisasi lokal, semakin efektif pula pengelolaan pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan yang

berkelanjutan dan inklusif.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pembangunan di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah desa berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, terutama dalam sektor infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan, meskipun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan anggaran dan pemerataan pembangunan.

Selain itu, peran PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) terbukti sangat signifikan dalam mendukung pembangunan desa. PKK tidak hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan, tetapi juga turut meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat ekonomi rumah tangga, mendorong pendidikan anak, meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kegiatan posyandu, serta menjaga solidaritas sosial dan lingkungan. Sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan PKK menjadikan pembangunan desa lebih inklusif, berkelanjutan, dan menyentuh aspek mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh aparat pemerintah, tetapi juga oleh dukungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan seperti PKK yang mampu memperluas basis partisipasi masyarakat desa.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait agar hasil penelitian dapat diterapkan secara nyata dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pembangunan desa. Pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas aparat dalam hal perencanaan, pengelolaan anggaran, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, pemerintah desa harus terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi lokal seperti PKK agar pembangunan lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

PKK disarankan untuk memperluas program-program pemberdayaan, khususnya di bidang ekonomi kreatif, literasi digital, dan lingkungan hidup. Hal ini penting untuk menjawab tantangan modernisasi sekaligus memperkuat kemandirian keluarga di desa. Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam berpartisipasi dalam setiap program pembangunan desa. Keterlibatan pemuda, perempuan, dan kelompok marjinal perlu ditingkatkan agar pembangunan lebih inklusif.

Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif, terutama untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran desa dan kontribusi PKK terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Penelitian lintas desa juga dapat memberikan perbandingan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, U., & Zulaika, T., (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal akademia akuntansi*, 2 (2). 119-144
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja journal*, 2 (2), 135-147
- Budiasa, K. (2021). *Baban Kinerja dan Kinerja Sumber Daya Manusia*. Cv Pena Persada. Jawa tengah
- Hastuti, A., & Suryanto, W. (2023). *Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 24(3),97-112. DOI: 10.1023/jep.v24i3.839
- Ikhsanuddin, M. M., (2020). kedudukan hukum pemangku desa yang baru tanpa pemberhentian sekretaris desa yang lama. Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas Halu, 1
- Kusman, F. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dilembaga Pendidikan Islam*. Garuda Waca. Yogyakarta
- MANDASARI, S.IP., M.Si, N. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PEMBANGUNAN DESA DAN STRATEGI MENUJU DESA MANDIRI (Studi Kasus di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci). *Jurnal Administrasi Nusantara*, 4(1), 62–72. <https://doi.org/10.51279/jan.v4i1.483>
- Marlita, V. S., & Widodo, S. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(2).
- Mateus, R. (2022). *Analisis Potensi Wilayah Pedesaan-pendekatan Efektif Dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian*. ANDI. Jawa timur
- Maubanu, A., Suprojo, A., & Adiwidjaja, I. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(1).
- Muhammad Nuram Raharjo. (2020). *Kepemimpinan Kepala Desa*. Bumi Aksara. Jakarta
- Mulyadi, A. & Purwanto, I. (2022). *Model Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa: Studi di Desa Kalimukti, Cirebon*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pembangunan, 17(3), 234-245. DOI: 10.13104/jisp.v17i3.1078

- Novita, Y. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 365-377.
- Pratama, D., & Mahmud, D. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Desa Mulyosari, Kabupaten Serang*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1),45-58. DOI: 10.31800/jep.v19i1.1234
- Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2018). Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *CosmoGov*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16131>
- Ramli, R. (2020). Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 2(2), 16–20. <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i2.1677>
- Ranto, F. F., Tulusan, F. M. G., & Palar, N. R. A. (2022). Kompetensi Aparatur Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan. *Jap*, 8(115), 42–48.
- Raymond. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV Citra Sentera.Padang
- Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2, 71–76. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606-624.
- Rusyan, T. (2018). *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa*. Bumi Aksara.Jakarta
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18–33. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>
- Satria, M., & Nur, L. (2021). *Evaluasi Pengelolaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Pembangunan Jalan di Kabupaten Purworejo*. *Jurnal Studi Pembangunan Daerah*, 14(1), 89-103. DOI: 10.32530/jspd.v14i1.3217
- Sensu, L., Tatawu, G., Dewa, M. J., Haris, O. K., & ... (2022). Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa Batubanawa Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah Kepada Masyarakat. *Halu Oleo Legal ...*,4(2),288–307. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/53%0Ahttps://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/53/23>
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y.

- (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *jurnal kewarganegaraan*, 5 (2) 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfa beta. Bandung
- Sulasmi, S., & Susanti, A. (2025). Strategi Efektif Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Adirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 93-104.
- Sunarso, B. (2019). *Sosiologi Pembangunan Desa*. Uwais Inspirasi Indonesia. Jawa timur
- Suryani, K. (2020). *Kinerja Sumber Daya Manusia*. Nila Cakra. Denpasar
- Sutopo, A. W., & Hadi, S. (2020). *Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia: Pendekatan Keberlanjutan dan Inovasi*. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 11(2), 113-125. DOI: 10.31800/jpp.v11i2.4567
- Ubi Laru, F. H., & Suprojo, A. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 367–371. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>
- Ulber, S. (2022). *Kepemimpinan Pemerintahan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Daam Pembangunan Desa*. Uwais Inspirasi.
- Wakerkwa, O. (2016). Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Kabupaten Lanny Jaya. *Jurnal Holistik*, 17, 1–22.
- Wijayanti, R. L., & Santoso, D. (2022). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. *Jurnal Ilmu Pembangunan*, 18(1), 45-60.
- Wijayanti, R. L. & Cahyono, D. (2023). *Evaluasi Implementasi Otonomi Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Wonosari, Gunung Kidul*. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 130-142. DOI: 10.31885/jadn.v9i2.5738